

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Karya Abdurrahman Wahid mengenai feminisme hanya terdapat dalam dua esai, yaitu Hak Asasi Wanita dalam Islam dalam buku Islam Kosmopolitan serta Islam dan Kepemimpinan Wanita dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Kedua tulisan ini membahas perkara yang sama, yaitu kepemimpinan perempuan dalam Islam. Ini karena Gus Dur berfokus pada bidang hak asasi yang masih menjadi perdebatan bagi umat muslim. Abdurrahman Wahid dalam mengungkapkan pemikiran feminismenya berargumen bahwa tafsir teks agama yang salah adalah penyebab dari ketimpangan gender. Dengan demikian, Gus Dur menyadari telah ada tafsir agama yang keliru dan bertekad untuk mengubahnya. Melalui kedua tulisannya, Gus Dur mengubah pandangan mengenai hadis larangan perempuan memimpin dengan menjelaskan konteks sosio historis. Secara umum pemikiran Abdurrahman Wahid yang demikian menunjukkan feminisme Islam, yaitu pemikiran dan gerakan yang menghendaki adanya penafsiran kembali teks agama dengan pengalaman perempuan. Implikasi yang dibawa dari tulisan Gus Dur belum signifikan mengubah perpolitikan perempuan Indonesia. Pemikiran yang dituangkan Gus Dur melalui karyanya berimplikasi pada tindakannya sendiri dalam mengambil keputusan saat menjabat sebagai ketua PBNU dan Presiden ke empat.
2. Pemikiran feminisme Gus Dur telah diaplikasikan sejak menjabat menjadi ketua PBNU. Gus Dur lebih banyak menuangkan pemikiran feminismenya ke dalam kebijakan praktis. Isu perempuan mulai diakomodasi sejak Muktamar NU ke-28 dan ke-29. Namun secara gamblang NU menyatakan sikapnya tentang hak perempuan dalam Maklumat tentang Kedudukan Perempuan dalam Islam. Secara umum maklumat tersebut mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan yang terumuskan di masa kepemimpinan Gus Dur terhitung progresif. Sayangnya, kebijakan tersebut masih mengandung bias gender

tampak dari pengakuan tugas domestik bagi perempuan. Karena masih dalam lingkup organisasi, maka kebijakan tersebut hanya memiliki implikasi di ranah organisasi. Sayangnya, kesadaran feminisme Islam Gus Dur tidak diikuti oleh anggota PBNU lain. Setidaknya ada dua alasan, *pertama*, isu feminisme belum dianggap sebagai isu strategis dan prioritas. *Kedua*, banyak kaum perempuan belum memahami haknya yang dijamin agama.

3. Pemikiran feminisme Islam Abdurrahman Wahid terimplementasi dalam kebijakan ramah gender, seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan yang tertuang dalam GBHN mengubah paradigma pembangunan di Indonesia menjadi *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender). Ini tentu saja berimplikasi pada penerapan pengarusutamaan gender di setiap sendi pemerintahan negara, yang pengaturannya disahkan melalui Inpres Pengarusutamaan Gender. Kebijakan Gus Dur sejalan dengan pemikirannya tentang feminisme Islam, yaitu pentingnya kepemimpinan perempuan. Adapun implikasi yang dibawa dari kebijakan itu adalah keharusan setiap lembaga pemerintahan untuk mengakomodasi perempuan menjadi bagian kepengurusan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pembaca
Melalui penelitian ini, penulis hanya mencoba untuk mencari tahu dimensi pemikiran feminisme Gus Dur berupa tulisan dan serangkaian kebijakan. Hasil penelitian yang didapat belum mampu membahas secara seksama dan hanya dapat menjangkau pemahaman di permukaan saja. Pembaca diharapkan bijak dalam memahami penelitian ini, serta melakukan usaha pengecekan untuk mendapat hasil lebih meyakinkan
2. Bagi Peneliti Lain
Gus Dur adalah sosok yang pemikirannya sering dianggap kontroversial. Termasuk pemikiran feminismenya. Namun secara umum, Gus Dur banyak memikirkan tentang HAM dan

Islam. Oleh karenanya, memahami pemikiran Gus Dur tidak bisa dilakukan secara terpisah, sedangkan penelitian ini terfokus pada pemikiran feminisme. Penulis mengharapkan penelitian yang akan mendatang mampu mengkaji pemikiran feminisme Gus Dur secara lebih komprehensif.

Penulis belum mampu menggambarkan secara khusus implikasi pemikiran feminisme Gus Dur berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Penelitian mengenai pemikiran feminisme Gus Dur selama ini berkaitan dengan segi HAM, sehingga diperlukan upaya penelitian lebih lanjut di bidang politik.

